

Stabilitas dan Tertib Sosial¹

Hermawan Sulistyو

Profesor Riset LIPI; Kepala Puskamnas dan Anggota Senat Akademik
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)
e-mail: bankconcern@gmail.com

Abstrak

Dengan menggunakan perspektif historis, konsepsi tentang stabilitas sosial dan tertib sosial sejak jaman Nusantara, Kolonialisme dan Indonesia menjadi fokus perhatian penulis dalam tulisan ini. Stabilitas dan ketertiban sosial yang dibangun atas proses-proses consensual conflicts akan menghasilkan sistem yang jauh lebih sustainable dan viable, ketimbang bangunan yang dibangun atas ikon nasionalisme. Perspektif ini memberikan kritik terhadap Benedict Anderson dan Ernest Renan yang cenderung menganggap fragmentasi unit-unit nasional menjadi bangunan stabilitas dan ketertiban sosial. Kecenderungan gerak masyarakat-masyarakat maju adalah integrasi kawasan, bukan fragmentasi unit-unit nasional yang cenderung membawa pertarungan antara wacana-wacana lokal vis-à-vis nasional.

Kata Kunci: Stabilitas Sosial, Tertib Sosial, Reformasi dan Indonesia

Pendahuluan

Judul ini merupakan dua topik yang dibangun sebagai kesinambungan rezim Orde Baru, namun kemudian mengalami semacam keterputusan pada masa transisi ke Orde Reformasi. Namun, sesungguhnya jalinan kedua topik ini semakin meneguhkan kesinambungan dalam wajah janus kontinuitas dan diskontinuitas dalam sejarah Indonesia – bahkan sejarah dalam konteks lebih luas, yaitu Asia Tenggara, karena dimensi-dimensi *cultural traits* yang sama dari kawasan ini. Dengan perspektif ini, maka keduanya adalah bagian dari tema kesinambungan dari fungsi-fungsi yang lebih bernuansa positif. Sekilas, ini tampak agak anomali dalam *scholarly juxtaposition*, yang umumnya menerapkan pendekatan lebih

¹ Semula, naskah asli artikel ini adalah mimeo dari teks Orasi Ilmiah Hermawan Sulistyو pada Dies Natalis XIX dan Wisuda Sarjana/Pasca Sarjana XV Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ) pada tanggal 2 Oktober 2014 di Auditorium PTTK, Jakarta. Teks dikembangkan dalam isi, konteks dan format yang berbeda (*expanded version*), sehingga artikel ini bukan teks Orasi Ilmiah tersebut.

negatif agar potret yang didapat bersifat *critical*— dan karenanya seolah-olah memenuhi standar akademik atau *scholarship* yang memadai.

Perpaduan kedua tema ini pada tataran praksis merupakan payung visioner bagi dinamika perkembangan di ruang gerak Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ) ke masa depan. Jika ditempatkan dalam lingkungan strategis yang lebih luas, Visi ini juga dapat berfungsi sebagai payung imajiner dalam menatap masa depan Indonesia. Suatu visi dengan topik-topik di bawah payung tema besar yang dalam perjalanan Indonesia modern telah terguncang dua kali, yaitu sewaktu kejadian 1965-1966 dan 1998. Dua peristiwa tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari diskontinuitas historis (*disruption*), namun dapat pula dipandang sebagai bagian dari tema kontinuitas historis.

Negara-bangsa (*nation-state*) dibangun atas *raison d'être* keniscayaan diperlukannya rumah bersama bagi apa yang disebut oleh Benedict Anderson sebagai *imagined communities*.² Di atas rumah itu, dipancang label ikonik kebangsaan. Pada kasus Indonesia, label itu adalah Pancasila dan NKRI. Namun, fondasi kebangsaan yang menopang infrastruktur itu belum selesai. Rasa sebagai keluarga besar yang bersama-sama tinggal di rumah bersama belum tumbuh merata. Kasus Papua misalnya. Berbagai skema *roadmap* belum memberikan jalan damai menuju rumah bersama.³ Sebagian yang lain sudah mencoba rumah bersama, dan merasa tidak nyaman, sehingga memilih pindah rumah, sekalipun berbiaya sosial-politik tinggi namun berhasil pindah rumah, seperti kasus Timor Timur; atau biaya yang agak kurang sehingga tidak atau belum berhasil, seperti Aceh. Di bawah bayang-bayang "*political misconduct*,"⁴ jalan yang diretas Perjanjian Helsinki juga belum menampakkan rumah yang nyaman di ujung jalan.

² Benedict RO'G Anderson adalah *le doyen* Southeast Asian studies. *Imagined Communities* (London; edisi revisi, Verso, 1986, mengubah banyak premis awal dalam edisi sebelumnya, khususnya tentang China dan Filipina) adalah mahakarya Anderson yang paling berpengaruh dalam studi nasionalisme. Sayang sekali, ruang kebebasan yang lebih sempit di Indonesia menyumbang pada pergeseran minatnya ke Thai studies— oleh rezim Soeharto (yang dimusuhinya) ia dicekal masuk Indonesia selama puluhan tahun.

³ Muridan Widjojo dengan lantang— dan hampir sia-sia— meneriakan "dialog tidak membunuh" bagi Road Map Papua; kutipan ini sebuah *tribute* untuk pemikiran dan upaya almarhum bagi Papua. Lihat Muridan S. Widjojo, ed., *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*, (Jakarta, LIPI, 2009); untuk perspektif emik, *Seri Pendidikan Politik Papua*, Jayapura, Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Gajar Timur, Jayapura.

⁴ Istilah ini digunakan dalam statement beberapa *scholar* LIPI saat menyatakan, bahwa perjanjian Helsinki tidak patut, karena menyetarakan posisi pemerintah pusat yang sah dengan sekelompok pemimpin gerakan separatis di dalam negara yang sama.

Lalu, tema-tema apa yang telah merajut kelampauan dan memiliki prospek ke depan bagi rumah bersama bernama NKRI itu? Setidaknya ada tiga tema yang berkelindan untuk menjawab status hipotetis tersebut, yaitu **stabilitas**, **ketertiban umum**, dan **kesejahteraan**. Ketiga tema ini sudah jelas tampil sebagai benang merah sejarah, dan tampaknya akan tetap berperan serupa bagi masa depan Indonesia. **Stabilitas politik** merupakan tema besar pada narasi *post-independence*, hingga puncaknya pada masa Orde Baru di bawah Soeharto. **Ketertiban umum** justru memiliki akar-akar yang jauh di kelampauan, bahkan pada masa proto-Nusantara. Derajat kelindan keduanya sangat berkorelasi dengan dimensi **kesejahteraan umum**. Derajat rendah kedua dimensi yang disebut pertama akan mempengaruhi capaian dimensi ketiga oleh rezim politik yang berkuasa; dan *vice versa*.

Jejak-jejak Kelampauan

Pada kelampauan yang jauh—bahkan sebelum tahap kolonialisme klasik, yang dicirikan oleh penjajahan tidak langsung—Nusantara kuno belum menjadi *nation-state* dalam pengertian modern, terutama sebagai suatu *imagined community*. “Nusantara” masih memiliki karakteristik yang serupa dengan masyarakat-masyarakat di *mainland* Asia Tenggara. Kekuasaan “negara” diukur dari jumlah warga, sehingga statistik cacah jiwa menjadi keniscayaan. Pola-pola relasi kekerabatan (*kinship*) dari penguasa (raja/ratu, kepala klan, suku) menjadi instrumen utama pemelihara stabilitas politik dan bangunan ekonomi. Dalam sejarah Eropa, pola *kinship* bahkan menjadi embrio terbentuknya kepolisian modern yang kita kenal sekarang; fungsinya tidak banyak berubah, yaitu pemelihara stabilitas dan ketertiban umum melalui penegakan hukum.

Masa proto Nusantara ini, hingga periode setelahnya, mengenal ekspansi dan kontraksi negara melalui konsolidasi dan dislokasi populasi. Kisah tentang tanah-tanah perdikan yang diberikan raja-raja Jawa sebagai strategi pemelihara stabilitas politik dan distribusi kekuasaan demi kesejahteraan yang lebih merata; suatu strategi yang juga dilakukan oleh para kaisar China melalui jalinan perkawinan politik, dan yang sesungguhnya mirip dengan **dekonsentrasi** dalam manajemen pemerintahan kontemporer.

Namun, *kinship* sebagai *discourse* politik kalah dalam kontestasi dengan narasi negara modern Westphalia yang berbasis teritori. Tidak ada lagi *localgenius* bagi keseimbangan (baca: stabilitas) kekuasaan, sebagaimana dilakukan oleh Vietnam dan Kampuchea saat mereka berbagi kuasa

berdasarkan pola-pola kultural masyarakat: penduduk yang berumah panggung “milik” Kampuchea, yang berumah di atas tanah milik Vietnam. Akibat kondisi geografis serupa, pemeliharaan stabilitas di Nusantara lama dibangun berdasarkan pola-pola kultural; yang mencolok adalah daerah-daerah dengan garis-garis kebudayaan menuruti aliran sungai: sisa-sisanya masih kentara daripola bahasa atau dialek lokal menuruti alur sungai.

Dalam kanvas supra di atas Nusantara, sejarah umat manusia, khususnya sejak Jaman Pertengahan, ditandai oleh mobilitas fisik mosaik peradaban dari apa yang disebut Timur, Barat, Kristen, Islam, dan sejumlah denominasi lain. Motivasi dan *rationale* pergerakan fisik itu bermacam-macam. Sebagian atas alasan perdagangan; sebagian lagi ekspansi kekuasaan demi bayangan tentang *grandiose* negeri asal guna memenuhi rasa lapar politik; sebagian lain membawa bagasi *mission civilistarice*; sisanya mungkin sekadar avonturisme yang bermanfaat.⁵ Tidak seperti halnya China—yang mengawali teknologi mesiu, namun kalah dalam kontestasi dengan Eropa untuk memanfaatkannya sebagai senjata dan perangkat pembunuh lainnya—maka berbagai “ekspedisi Eropa” tersebut menghadirkan kekuatan yang luar biasa (*mighty power*); tentu saja mereka bukan lawan tanding yang setara bagi kekuatan-kuatan lokal Nusantara maupun negeri-negeri kecil lain di Asia Tenggara.

Tetapi, sekalipun *mighty power* datang bagaikan *blitzkrieg* yang menggetarkan, kekuatan asing itu tidak mampu hadir secara permanen, sehingga mereka memerlukan mitra-mitra lokal demi memelihara stabilitas dan ketertiban umum. Dimensi kesejahteraan publik, yang sebelumnya relatif terjaga oleh mekanisme *kinship* sebagai pemelihara stabilitas politik—dengan contoh kasus paling mencolok adalah, sekali lagi, tanah-tanah perdikan—kini terguncang, karena bertambah dengan kehadiran tuan baru, yang berasal dari negeri metropolitan nun jauh di antah berantah; di tanah Eropa. Sumberdaya tak cukup untuk bisa dibagi secara merata dan adil karena ada masyarakat metropolitan yang harus

⁵ Bagaimana pun, generasi kemudian hari harus berterima kasih kepada mereka. Tanpa William Marsden dan Sir Thomas Stamford Raffles, mungkin Sumatera, Singapore—dan untuk derajat lebih rendah, barangkali termasuk Jawa—tidak akan pernah kita kenali jejak-jejak sejarahnya sebagaimana sekarang. Misalnya, catatan William Marsden dalam *The History of Sumatera: containing an account of the government, laws, customs and manners of the native inhabitants, with a description of the natural productions, and a relation of the ancient political state of that island* (London: Printed for the author, 1784) dan Sir Thomas Stamford Raffles, *The History of Java* (London: John Murray, 1817) dan puluhan catatan “ekspedisi” kaum avonturis ini merupakan warisan pengetahuan yang luar biasa. Kisah-kisah lain dalam James R. Rush, ed., *Java: A Travellers' Anthology*, (USA : Oxford University Press, 1996).

disuapi. Kisah Drogstapel – Saijah dan Adinda, adalah potret hitam putih yang sangat tajam. Memalukan untuk masa kini, tetapi itulah fakta yang paling representatif dari sepotong periode yang kelam dalam sejarah peradaban manusia.

Kalangan sejarawan sepakat, bahwa garis batas (*watershed*) dalam sejarah kolonialisme dunia adalah sekitar tahun 1750. Watershed ini menandai berakhirnya kolonialisme klasik, sekaligus bermulanya *high colonialisme*. Pada periode Kolonialisme Klasik, penjajah hadir sebagai hantu yang hanya tampak melalui tangan-tangan lokal. Kini, pada periode *High Colonialism, mightypowers* hadir langsung dan telanjang, tak lagi melalui tangan-tangan lokal semacam Bupati Lebak.

Untuk Asia Tenggara, pertanda itu ditampilkan oleh runtuhnya simbol peradaban Siam (dan, tentu saja, Asia Tenggara pada umumnya) di Ayuthaya, yang hancur akibat invasi Burma. Untuk Nusantara, inilah awal dari dampak Perjanjian Gianti. Basis cacah jiwa digantikan teritori; negeri-negeri Jawa pun mengalami kontraksi, menjadi majemuk. Suatu proses dekonstruksi yang bukan hanya fisik melainkan sekaligus dekonstruksi imaji-imaji peradaban. Periode *High Colonialism* ditandai dengan stabilitas dan ketertiban umum yang dibangun dari moncong senapan marsose di Nusantara,⁶ dengan sedikit mungkin konsensus politik. Periode *high colonialism* adalah puncak penderitaan masyarakat-masyarakat Nusantara, karena sumberdaya yang tersedot ke negeri metropolitan. Inilah periode ketika konsep *Rust en Orde* diperkenalkan pemerintah kolonial Belanda. Suatu konsep yang hadir hingga usainya *high colonialism* akibat datangnya Perang Dunia II, awal 1940an.

Rust en Orde membentuk bangunan stabilitas yang kokoh, karena moncong senjata sama sekali tidak mampu dikontestasi oleh keris, tombak, badik, kujang, dan entah apalagi. Hanya rencong yang tidak mampu diredam mimis Belanda. Untuk Aceh, Belanda masih menggunakan strategi lama *rust en orde*, yaitu politik *divide et impera* berupa kontestasi dengan kekuatan-kekuatan lokal Nusantara lain.⁷ Unsur koersi juga hadir dalam strategi pemeliharaan stabilitas dan ketertiban umum lain, yaitu pemilahan masyarakat berbasis ras, dengan fungsi yang berbeda-beda:

⁶ “Marsose” adalah paramiliter Belanda, yang berasal dari kata Perancis, *marcher* (berbaris); cikal bakal proto Polisi Istimewa dan Brimob, dengan fungsi yang tak jauh berubah, yaitu pemelihara stabilitas dan ketertiban umum. Marieke Bloembergen, *Polisi Zaman Hindia Belanda: Dari Kepedulian dan Ketakutan*, (Jakarta, Kompas, 2009).

⁷ Di berbagai pemukiman di Aceh, dengan mudah kita jumpai daftar nama “pasukan Belanda” yang gugur terhormat dalam kampanye pasifikasi. Hampir semuanya adalah nama-nama Jawa dan Ambon; hanya ada sedikit komandan dengan nama Belanda yang ikut “gugur.”

bule penjajah adalah warganegara kelas satu; Vremde Osterlingen atau Timur Jauh (khususnya Arab dan China) adalah kelas menengah, sebagai garis batas politik dan sosial-kultural; dan *inlander*, pribumi, yang sekelas dengan anjing dan binatang peliharaan lain. Yang terbentuk kemudian bukan seperti “*dual economy*”nya Boeke,⁸ melainkan political brokerage Vremde Osterlingen oleh penguasa kolonial untuk pengendalian stabilitas kelas *inlander*.

Di sini, “ketertiban umum” adalah tafsir penguasa kolonial atas *orde* yang tak mengancam kekuasaan politik. Suatu tafsir yang jauh di kemudian hari direproduksi oleh Orde Baru sebagai narasi kekuasaan: Trilogi Pembangunan, dengan stabilitas nasional sebagai prasyarat mutlak bagi pembangunan nasional, sementara “pemerataan” hanya dimungkinkan setelah keduanya terpenuhi, dengan implikasi bangunan kertas yang rapuh manakala kue pembangunan tidak cukup untuk dibagi; belum lagi oktopus ekonomi jelas tidak akan berhenti dari rasa laparnya, sehingga keadilan dan pemerataan adalah wacana publik yang tak harus dipenuhi.

Namun, pada periode *high colonialism* yang sama menguat pula pemikiran sosialisme di Eropa Barat. Kontestasi berbagai pemikiran besar di les bistro di la rue Montmartre dan sudut-sudut Paris lainnya menyentuh Belanda. Puncak dari pergulatan pemikiran ini terjadi manakala kaum “kiri lunak” – untuk menyebut spektrum yang lebih luas dari sekadar kaum sosialis – menguasai kepolitikan Belanda; pergeseran pun terjadi pada mainstream pemikiran dan narasi politik di bawahnya, yang menjadi supra struktur kolonialisme di Hindia Belanda.

Politik Etis dicanangkan; Hindia Belanda mengalami pendekatan yang lebih *soft* dalam pengelolaan stabilitas negeri jajahan. Politik Etis memang dapat ditafsirkan sebagai “balas budi” Belanda melalui pendidikan yang lebih baik bagi penduduk Hindia Belanda. Tetapi, dapat juga perkembangan ini ditafsirkan sebaliknya. *Etische Politiek* hanya lah instrumen baru di dalam kerangka *rust en orde* yang lama. *Inlander* yang lebih berpendidikan pasti menjadi instrumen *political brokerage* yang lebih efektif. Tesis ini terlihat dari disparitas pendidikan antara Hindia Belanda dan negeri metropolitan dan sekitarnya di Eropa Barat, hingga keruntuhan kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Rata-rata “pendidikan tinggi” itu hanya HIS atau SD; mereka yang beruntung bisa melanjutkan ke MULO atau SMP; dan hanya kalangan kecil dari anak-anak broker

⁸ Studi Boeke tentang masyarakat kolonial di Burma dan Hindia Belanda menunjukkan dua sistem perekonomian—penjajah dan terjajah—yang berjalan seniri-sendiri dan hanya bersentuhan di pasar.

politik kekuasaan lokal yang boleh menempuh jenjang AMS (SMA).⁹ Pada ujung kekuasaan Belanda memang ada sejumlah kecil kalangan yang sama memperoleh kesempatan menempuh pendidikan tinggi di negeri metropolitan. Mereka lah kelompok inti *creoles* dan *mestizos* dalam embrio nasionalisme-nya Benedict Anderson.

Belanda pergi tidak meninggalkan jejak-jejak kultural karena sistem *indirect rule* dalam manajemen stabilitas dan ketertiban umum. Yang penting *rust en orde* berjalan dengan baik. Kenyamanan kolonial dirawat dengan pelapisan budaya yang tebal. Jadi, jika pada ujung kekuasaan kolonial Hindia Belanda ada segelintir *creoles* dan *mestizos* yang pergi ke negeri liliput Belanda – jarak Amsterdam hingga Maastricht hanya sepelemparan batu saja – membuka mata mereka tentang ketidakseimbangan, dan karenanya menggelorakan pertumbuhan proto nasionalisme – kondisi itu bukanlah *by design*.

Memang ada elemen filantropisme di sana – sebagaimana sumber pemikiran “kiri lunak” yang mengawali – namun implikasi yang sangat jauh dan mendalam dari mendidik kaum inlander sekadar melek huruf dan lulus SD pasti tak pernah terbayangkan. Apalagi perkembangan selanjutnya, bahwa “anak-anak lulusan SD” itu mulai berbicara dalam bahasa dan benak yang dipahami tuan-tuan kolonial mereka. Pergerakan kebangsaan pun menjadi keniscayaan, yang pada ujungnya mulai menggerogoti *rust en orde* di Hindia Belanda, negeri jajahan nun jauh di belahan bumi yang lain.

Sekalipun tampaknya *rust en orde* berlangsung mulus dan kokoh pada tataran praksis, perbenturan narasi besar pada tingkat pemikiran mulai menimbulkan pergolakan batin; diseminasi keresahan dilakukan, konsolidasi visi pun terbentuk. Hindia Belanda hanya menunggu waktu saja untuk berubah menjadi Indonesia.

⁹ Bandingkan dengan kondisi di Belanda dan Eropa Barat pada waktu itu – banyak negeri Eropa Barat adalah juga metropolitan kolonial; Inggris Raya bahkan sudah mencanangkan “*British rules the waves*.” King’s College dan Queen Mary di Inggris sudah berdiri delapan abad sebelum penduduk Hindia Belanda senang karena bisa lulus SD; Universitas Gregoriana di Roma bahkan jauh lebih tua lagi. Semua kota besar di Eropa Barat memiliki lembaga-lembaga pendidikan tinggi dari kelampauan yang jauh, saat kita baru mengenal Majapahit hingga Mataram II. Sudah barang tentu Roma dan peradaban tua lainnya membangun pendidikan tinggi mereka beberapa abad lebih awal lagi. Yang menarik adalah, jangkauan peradaban Islam hingga ke Andalusia (Portugal sekarang) tidak meninggalkan jejak peradaban sama sekali kecuali sisa-sisa mural; sementara di negeri asal peradaban Islam itu pendidikan tinggi nya semakin lama justru semakin jauh tertinggal dari *counterparts* Eropa mereka.

Dalam *capsule history*, Nusantara, kemudian Hindia Belanda, sebelum akhirnya Indonesia, *viable* sebagai suatu sistem peradaban (politik, ekonomi, sosial, kebudayaan) karena bangsa ini memiliki kapasitas untuk mengunyah (*eschewing*). Apa saja dikunyah dan ditelan; jika nyaman, ditelan semua; jika ada yang tak nyaman, sisanya dimuntahkan kembali. Islam sinkretis Wali Songo berkembang menuruti proses seperti ini. *The mighty power* Belanda datang, diterima, dirasakan, dan dicoba. Ketika terasa tidak enak dan nyaman, eskapisme dilakukan dengan cara-cara kultural non-politis.¹⁰ Perkenalan dengan pemikiran Barat—antara lain melalui Bastian dan lain-laun—menimbulkan gagasan Tan Malaka tentang “Hindus-nesia” alias pulau-pulau yang terpengaruh budaya Hindu.

Kemudian, hampir dapat dipastikan, bahwa Bung Karno terinspirasi oleh *Naar de Republik*-nya Tan Malaka, sebelum ia berteriak lantang, “Indonesia Merdeka”! Denominasi “Indonesia” adalah pinjaman dari konsep Yunani mengenai pulau-pulau kecil, yang tidak ada dalam khasanah pemaknaan kosa kata lokal apapun di Nusantara.¹¹ Adaptasi, amalgamasi, akulturasi, serta proses memamah biak kebudayaan inilah landasan *viability* multi-sistem Nusantara, Hindia Belanda, dan Indonesia. Menafikan kapasitas ini sama dengan menafikan sejarah panjang kelenturan peradaban Nusantara.

Intermezo Jepang

Manakala Jepang datang dan menggetarkan para setan bule Belanda, dengan cepat euforia pembebasan berubah menjadi neraka baru. *Blitzkrieg* Jepang tak hanya meruntuhkan imaji-imaji kekuasaan kolonial, melainkan sekaligus meruntuhkan bangunan *rust en orde* hingga ke akar-akarnya. Sebagaimana karakter “mengunyah” Nusantara, kedatangan Jepang pun disambut penuh harap, sekalipun curious. *The mighty power* yang baru dari negeri Matahari Terbit bukan orang asing yang harus ditolak; mereka adalah saudara tua dengan peradaban kuno yang melewati kelampauan

¹⁰ “Buto cakil” adalah sosok yang baru ditambahkan pada puncak *high colonialism* awal abad ke-18, saat orang Jawa tak berdaya menghadapi kekuatan fisik kolonial dan berusaha melawan melalui simbol-simbol yang dapat menjalankan fungsi *self-fulfillment*. Simbol itu adalah deformasi tubuh: bule jelek yang tonggos, *dogol*, jahat dan akhirnya mati (kalah). Simbolisme serupa pada pertarungan klasik antara kerbau melawan harimau: logika awam pasti memenangkan harimau, sementara dalam pertarungan tete-a-tete kerbau selalu menang; pertarungan hidup-mati kerbau melawan harimau merupakan tema favorit lukisan klasik maupun modern.

¹¹ Sama halnya, Micronesia (micro: kecil), Polynesia (poly: banyak), Melanesia (Malay: Melayu).

Nusantara; mereka adalah ikon baru melawan kekuasaan kolonial Hindia Belanda.

Pendeknya, Jepang adalah Sang Pembebas; dengan sedikit *creoles* yang menatap penuh curiga dan akhirnya menarik diri seperti kura-kura. Bahasa politik “perjuangan di bawah tanah”nya Syahrir hanya eufemisme, tak lebih dari kegiatan mendengarkan siaran radio pendudukan Jepang. Sementara Bung Karno dan kawan-kawan, yang memilih jalan klasik Nusantara—“Mengunyah dan Menelan”—mencuri kesempatan untuk membangun mimpi besar tentang Indonesia Raya yang Merdeka. Di bawah perspektif ini, tampaknya sejarah perlu merevisi makna konsep “perjuangan bawah tanah” dan “kolaborator Jepang.”

Stabilitas adalah syarat mutlak di bawah situasi Perang Asia Timur Raya. Berlangsung proses yang terbalik dibandingkan masa Belanda. Sebelumnya, terjadi akulturasi dan amalgamasi, baru disusul *rust en orde* melalui *law enforcement*. Kini, Jepang hadir dengan moncong senjata yang lebih besar, lebih banyak, dan lebih tega dibanding Belanda. Baru menyusul elemen-elemen kultural. Sujud bagi muslim menghadap kiblat, diganti seikerei menghadap Jepang, sebagai simbol *mighty power* yang sering diterjemahkan secara sederhana sebagai Dewa Amaterasu yang diwakili oleh sosok kaisar.

Tanpa interaksi sosial dan kultural yang memadai—terutama karena di bawah suasana perang—hanya pengenalan sistem pemukiman yang diterima dan diadopsi sepenuhnya oleh warga Indonesia. **Tonarigumi** diadopsi sebagai RT/RW dan berlaku hingga sekarang.¹² Sebuah *vision and heat* yang berjangkauan jauh ke masa depan.¹³ Jepang memperkokoh *rust en orde* menjadi bangunan stabilitas berlandaskan, mula-mula, koersi masa perang; baru kemudian dilakukan imposisi kultural, tetap secara koersif; melalui “komunikasi bagero” satu arah.

¹²Semua negara yang pernah dijajah Jepang semasa PD II mengadopsi sistem pemukiman ini. Sistem ini juga diadopsi, dengan modifikasi, oleh banyak negara lain yang menganggap efektif sebagai jari-jari tangan negara. Namun banyak negeri lain yang tidak menerapkan sistem administrasi pemukiman tonarigumi atau RT/RW karena mobilitas geografis di dalam negeri oleh warganegara adalah hak dasar Ecosoc yang harus dihormati dan dipenuhi negara; sementara sistem RT/RW mengandaikan mobilitas yang rendah, bahkan tidak ada mobilitas. Lihat selanjutnya dalam Aiko Kurawata, *Nihon Senryoka no Jawa Noson no hen'yo* (Tokyo: Sosisha, 1992). Edisi Indonesia, *Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945* (Depok : Komunitas Bambu, 2015).

¹³Terekam dengan sangat baik dalam William H. Frederick, *Visions and Heat: the Making of the Indonesian Revolution* (Athens: Ohio University Press, 1988); Versi Indonesia, *Pandangan dan Gejolak Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1989).

Tonarigumi menjadi instrumen stabilitas yang sangat efektif. Setiap anomali sosial yang dapat menjadi bibit instabilitas dengan mudah dikenali dan diatasi. Mata negara mampu melihat hingga ke ruang tamu setiap keluarga. Sistem tonarigumi sangat mudah diadopsi orang Indonesia karena sesuai dengan karakter paguyuban (*gemeinschaft*) masyarakat Nusantara. Pada masa Jepang, masyarakat perkotaan pun masih bersifat paguyuban dan belum patembayan (*gesselschaft*) sehingga secara umum *order maintenance* dapat ditegakkan; di atas kertas malah lebih kokoh ketimbang *rust en orde* zaman Hindia Belanda. Kombinasi antara moncong bedil dengan imposisi struktur sosial melalui sistem pemukiman tonarigumi menimbulkan efek dahsyat terhadap pranata-pranata yang ada. Ditambah lagi, bahwa kolonial Belanda ternyata bukan *mighty power* seperti imaji sebelumnya. Vakum imaji—bukan hanya vakum kekuasaan—ini dengan cepat diisi pemerintahan pendudukan Jepang. Namun, Jepang membawa sekaligus menghadapi situasi yang tidak normal, sehingga perjalanan *rust en orde* terputus, tidak berlanjut, dan sulit membangun yang baru sama sekali.

Situasi itu adalah, pertama, peperangan Asia Timur Raya, sebagai bagian dari skema Perang Dunia II. Peperangan membuat kampanye pasifikasi berlangsung cepat. Hanya dalam hitungan minggu dan hari, seluruh kawasan Asia Timur Raya (dari Korea, China, seluruh kawasan mainland Asia Tenggara, hingga ujung timur Nusantara) jatuh dan dikuasai Jepang. Tetapi, mobilisasi ini terhenti karena situasi perang berbalik. Kekuatan Sekutu menghentikan laju Jepang. Kedua, sumberdaya yang semakin berkurang, khususnya bahan pangan dan sandang, sebagai akibat dari ekonomi perang. Masa-masa “seumur jagung” adalah periode penderitaan yang luar biasa bagi penduduk Hindia Belanda. Jagung dan gaplek sudah merupakan kemewahan; bekas karung menjadi bahan sandang. Ketiga, benturan kultural. Perang memustahilkan persiapan kultural yang memadai bagi unsur-unsur pendukung.¹⁴ “Komunikasi Bagero” memperlebar jarak antara imaji Sang Pembebas dengan realitas di depan mata. *Rust en orde* versi pendudukan Jepang pun hanya tinggal menunggu waktu untuk roboh.

Kebutuhan perang dan kendala personel militer membuat Jepang terpaksa mengembangkan *auxiliaries* seperti Heiho dan PETA. Kondisi lingstra peperangan dan absennya penguasa lama Hindia Belanda menimbulkan kekosongan instrumen pemelihara *rust en orde*. Sementara stabilitas dan ketertiban umum tetap harus dirawat, sehingga diperlukan

¹⁴ Discourse kultural dalam Taichi Sakaiya, *What Is Japan? Contradiction and Transformation*, (New York: Kodansha International, 1993).

instrumen-instrumen baru. Pengisian kebutuhan ini dilakukan dengan menarik para pemuda dari seluruh penjuru Nusantara. Inilah untuk pertama kalinya *imagined community* terbangun, dari imaji-imaji absurd menjadi realitas politik yang dapat diwujudkan. Bibit nasionalisme telah disemai, dari sekadar tahap proto dan bibit awal pada akhir masa Hindia Belanda. Penduduk Nusantara mengikuti jejak tetangga-tetangga *counterparts* di Asia Tenggara, yaitu **untuk pertama kalinya Nusantara – serta Asia Tenggara – dipersenjatai**. Instrumen utama pemelihara *rust en orde* dalam wajah baru, di tengah situasi peperangan, dan di bawah majikan baru yang mengklaim sebagai “saudara tua,” dengan *self prophecy* pembebasan kawasan Asia Timur Raya – mengikuti alur *mission civilisatrice* Enlightenment Eropa lima abad sebelumnya; orang-orang Jepang datang sebagai filantropis, mereproduksi niat dan sikap kaum avonturir Eropa.

Proses belajar memegang senjata memberi ruang persentuhan bagi imaji-imaji kaum pemuda tersebut. Visi pun terbentuk dari pengalaman bersama; semacam *shared experience*-nya Ernest Renan. Sebuah embrio revolusi melalui “kentut.”¹⁵ Jadilah mereka sebuah *cohort* politik – “pemuda” dalam bahasa Anderson¹⁶ – yang berperan sangat signifikan dalam kemerdekaan Republik Indonesia; suatu pergolakan yang akhirnya diberi label “Revolusi Pemuda.” Visi kebangsaan diterjemahkan ke dalam *praxes* real politik.

Manakala PD II menunjukkan gejala penampakan ujungnya, dan Jepang semakin gamang menghadapi situasi yang berubah cepat, “seumur jagung” berlatih memegang senjata sudah cukup memadai. Untuk pertama kali dalam sejarah Nusantara, skema kaum pemuda yang dipersenjatai, mulai membuah hasil. *Auxiliaries* bertransformasi menjadi para militer; tak sulit bagi sebagian untuk menjadi kekuatan militer baru, dan sisanya menjadi instrumen pemelihara stabilitas dan ketertiban umum sipil, alias polisi.

¹⁵ Arsip sejarah – saya berutang pada William Frederick untuk sumber ini – mencatat, para pemuda itu datang dari berbagai daerah, kebanyakan berasal dari kalangan keluarga elite lokal, sehingga ketika harus hidup dalam kamp militer mengalami problem gastronomi; perubahan dari menu roti ke makanan berserat di lapangan. Sewaktu mereka merasakan bau kentut yang sama, tumbuh lah *shared experience* bahwa mereka sesungguhnya berada di rumah yang sama. Revolusi kentut terbukti sebagai persemaian nasionalisme yang efektif.

¹⁶ Tesis utama Benedict RO’G Anderson dalam *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance* (Ithaca: Cornell University Press, 1972). *Counter-discourse* dalam, George McTurnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, (Ithaca: SEAP, 2003).

Studi Larson menunjukkan, kekuatan persenjataan mereka jauh lebih kuat dibanding *legacies* di tempat-tempat lain, dalam menghadapi kembalinya kekuatan kolonial lama. Sekalipun tidak pernah ada upaya revisi sejarah revolusi Indonesia mengenai kaum pemuda revolusioner yang hanya bersenjatakan bambu runcing untuk menghadapi kembalinya *the mighty power* kolonial Belanda; bukankah bangsa kita memang masih perlu *nation building* melalui *grandiose* perjuangan bersenjata para *founding fathers* jalanan?

Dalam kerangka *rust en orde*, revolusi identik dengan hadirnya situasi anomie. Apalagi memang tidak ada “nilai-nilai lama” sebelumnya – bukankah pelapisan sosial berupa tiga kategori kelas sebagaimana disebut di atas telah membuat masyarakat memang tidak pernah mengalami *blended culture*? – sementara tidak ada nilai-nilai baru yang datang untuk menggantikan, atau sekadar berdampingan, dengan yang lama (yang memang tidak ada). Tidak heran – jika bahasa dapat digunakan sebagai indikator status anomie dan proses akulturasi – bahwa hanya dalam setengah lapis generasi saja sudah tidak ada orang Indonesia yang berbahasa Belanda; sementara sesaat setelah Jepang pergi dan “komunikasi bagero” hilang, tidak ada lagi pernik kebudayaan Jepang yang tertinggal; kecuali, tentu saja, tonarigumi yang telah berubah wajah. RT/RW menjadi instrumen perawat stabilitas dan pemelihara ketertiban umum; sebuah “instrumen cuak” untuk memata-matai setiap potensi *dissenting* yang berbahaya bagi negara. Tentu saja, penguasa politik lah yang paling berhak mendefinisikan potensi seperti itu.

Padahal dalam situasi pasca perang tidak ada pemegang otoritas kekuasaan, sehingga tidak ada definisi di bawah suasana “*wild-wild west*”; berkembang lah apa yang disebut *Jingo-ism* atau “jagoanisme.”¹⁷ Karakter situasi yang hadir sebagai elemen disruptif dalam *rust en orde*, tata tentrem kerta raharja, ketertiban umum, stabilitas nasional, dan jargon serupa lainnya; berkali-kali hadir dan direproduksi dalam sejarah kekerasan politik Nusantara – dan kemudian, Indonesia.¹⁸

Negara kemudian mencari strategi *order maintenance*; satu-satunya jalan termudah, efektif, dan sudah pernah dijalani, ialah dengan koersi. Semakin terfragmentasi masyarakat, semakin diperlukan dan mudah

¹⁷ Kisah yang diangkat dalam film Naga Bonar melukiskan situasi ini. Untuk referensi, Robert Cribb, *Gangster and Revolutionaries: The Jakarta People's Militia and the Indonesian Revolution 1945-1949*, North Sydney NSW, Asian Studies Association of Australia, 1991; versi Indonesia, *Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta, 1945-1949*, (Jakarta: Masup Jakarta, 2010).

¹⁸ Untuk reproduksi 1965-1966, Hermawan Sulistyono, *Palu Arit di Ladang Tebu*, (Jakarta: Gramedia, 2004).

dilakukan integrasi sistem kemasyarakatan. Strategi yang direproduksi terus-menerus oleh rezim politik yang ganti-berganti, hingga masa Orde Baru di kemudian hari.

Peradaban Nusantara telah membuktikan *viability* melalui kapasitas untuk mencerna (*escewing*). Pada kelampauan yang jauh, kapasitas ini mereproduksi dan memperbaiki unsur-unsur asing menjadi *local geniuses* yang semakin baik dari satu generasi ke generasi berikut. Pada kelampauan yang lebih dekat, situasi revolusi kemerdekaan pasca Proklamasi 17 Agustus 1945 memuncak pada kesepakatan kebangsaan yang dirumuskan dalam Pancasila.

Setelah Indonesia merdeka-*self-acclaimed* 17 Agustus 1945 maupun versi Belanda 1949¹⁹-hadir penghampiran *post-colonial discourse* pada kebudayaan, sementara di ruang politik berbagai *discourses* berkontestasi tanpa pemenang. Akibatnya, arsitektur pemerintahan pun menjadi eksperimental. Kapasitas *eschewing* kali ini tidak lagi positif—jika dihindari dengan skema integrasisehingga tema *rust en orde* yang masih berlanjut dalam narasi *post colonial* terpaksa juga harus didekati dengan *discourse* baru. Pengelolaan ketertiban umum, misalnya, dijalankan oleh kepolisian Negara-setelah transformasi dari marsose, polisi istimewa, dan lain-lain. Namun, jagoanisme dan jingoism di jalanan harus diatasi dan ditempatkan di bawah kerangka kekuasaan negeri yang baru merdeka.

Sementara itu, negeri baru dipenuhi oleh birokrasi lama eks kolonial Hindia Belanda. Karakter *beamtenstaat* diteruskan oleh republik muda. Hasilnya cukup efektif dalam stabilisasi birokrasi. Rezim politik jatuh bangun, ganti berganti, tetapi rezim birokrasi tetap stabil, bahkan menguat hingga konsolidasi selesai pada akhir dekade 1950an. Periode "*nation building*" ini berhasil pada rezim birokrasi, namun menimbulkan kontroversi dalam hal konsolidasi ekonomi. *Mainsteam discourse* percaya, bahwa periode ini merupakan kegagalan ekonomi, karena rezim-rezim politik menerapkan *discourse* liberalisme: politik partai dan parlementarisme.²⁰

Keseimbangan konsensus dan konflik sulit terjadi; pendulum stabilitas bergerak dari satu titik ekstrem ke titik ekstrem satunya. Puncaknya adalah Demokrasi Terpimpin yang dicanangkan oleh Bung

¹⁹ Jika mempertimbangkan fungsi sejarah sebagai instrumen *nation building*, versi Indonesia jelas memiliki rationale yang kuat; jika melihat syarat-syarat normatif terbentuknya sebuah Negara-khususnya syarat adanya pengakuan internasional-maka versi Belanda juga masuk akal pula.

²⁰ Namun beberapa studi-seperti tesis Adnan Buyung Nasution-membuktikan sebaliknya, bahwa tidak ada keruntuhan ekonomi pada periode ini.

Karno. Selebihnya, sejarah kontemporer Indonesia menyaksikan, arah instabilitas politik berjalan linier dengan instabilitas ekonomi, menuju ke jurang kebangkrutan multi dimensi. Reproduksi kekerasan politik berlangsung dalam skala masif pada tahun-tahun 1965-1966; stabilitas dan ketertiban umum pada titik nadir, digantikan oleh integrasi berdasar senjata.

Pemenang pertarungan politik tak hanya menentukan narasi-narasi sejarah, melainkan juga membangun discourse baru: masa depan Indonesia harus dibangun atas narasi keutamaan pembangunan ekonomi. Politik sebagai panglima telah ditinggalkan, dan prasyarat untuk narasi baru ini ialah **Stabilitas**: sebuah kata kunci dan satu dari dua sisi mata uang yang sama dengan **Pembangunan**. Dalam *political parlance*, sebuah ikon baru dimunculkan sebagai *publicdiscourse*—**Trilogi Pembangunan**: Stabilitas Nasional; Pembangunan Ekonomi; Pemerataan. Para pundit ekonomi pun berkolaborasi dengan pemegang moncong senjata dan mimis, dalam apa yang mula-mula dilegitimasi pada Seminar II AD tahun 1966; narasi-narasi besar liberalisme yang dijaga oleh anjing-anjing herdernya.²¹ Bagi para pelaku, atau pemain, ini sebuah kolaborasi yang dahsyat dalam menghadirkan stabilitas dan ketertiban umum; sebaliknya, bagi para pengkritik—yang di kemudian hari merasa mendapat pembenaran dengan keruntuhan rezim kertas Orde Baru—inilah perselingkungan antara kekuatan *discourse* ekonomi sebagai basis materai peradaban dengan moncong senjata yang menakutkan, dan seringkali mematikan. Parade para jenderal masa ini seringkali menarik minat beragam alur *Indonesian studies*.²²

Persis tiga dekade kemudian, bangunan kertas Orde Baru mulai goyah, sebelum akhirnya rontok pada proses yang kita namakan Reformasi—sesungguhnya penghalusan dari “revolusi,” karena Reformasi ingin menghilangkan dimensi kekerasan politik dalam Revolusi: “suatu revolusi akan memakan anak-anak kandungnya sendiri.”

Reformasi dimulai dengan hiruk pikuk mahasiswa;²³ gerbong politik menyusul. Namun, sebagaimana dalam revolusi yang memakan anak-anak kandungnya sendiri, “Reformasi” pun tak jauh berbeda: anak-anak

²¹ Kelompok yang lebih suka belakangan disebut sebagai “teknokrat,” namun yang oleh para pengkritik diberi label “Mafia Berkeley.” Lihat perkembangan discourse ini dalam Widjojo Nitisastro, *Pengalaman Pembangunan Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2010).

²² Karya-karya seperti Harold Crouch; David Jenkins, *Soeharto di Bawah Militerisme Jepang*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010); dan lain-lain merupakan barang haram yang memperkaya pemahaman kita akan periode yang sangat tertutup itu.

²³ Salah satu rekaman semasa yang komprehensif, Muridan S. Widjojo et.al., *Penakluk Rezim Orde Baru: Gerakan Mahasiswa '98*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999).

Gerakan Pro-Reformasi telah kehilangan kesempatan kuliah, kehilangan ijazah—dan karenanya, kehilangan kesempatan memperoleh skill guna menghadapi masa depan yang semakin tidak menentu. Mereka—anak-anak kandung Reformasi yang menjadi korban—adalah cermin betapa stabilitas dan ketertiban umum dalam situasi anomie adalah reproduksi sejarah; sekalipun *l'histoire se repete* bukan tesis yang niscaya. Mereka bukan—atau belum?—menjadi “kaum *anarchists*” dari rahim pergolakan mahasiswa Eropa Barat, yang tiga dekade kemudian menempuh berbagai jalan: eksekutif pemerintahan; terorisme; dan sebagian besar politik parlemen. Bagi kaum “anarkis Reformasi” ini, stabilitas adalah omong kosong, dan ketertiban umum sudah *obsolete*, kata usang yang ternyata tidak laku lagi.

Masa depan Indonesia

Kecenderungan gerak masyarakat-masyarakat maju adalah integrasi kawasan, bukan fragmentasi unit-unit nasional. Sekalipun tesis utama Renan hingga Anderson mengenai terbentuknya nasionalisme dan nation-states, serta peran creoles dan pelaku perubahan peradaban bangsa-bangsa lainnya masih dipercaya, dianut, dan dijadikan panduan kaum *zoon politikon* di negeri-negeri yang sedang bergerak, konsep-konsep itu tak lagi memadai sebagai rationale kontraksi negara. Lihat lah betapa cepatnya Schengen States bertransformasi—tak lagi sekadar berevolusi—menjadi supra-sates yang semakin lama semakin memikat negeri-negeri tetangga. Masih sulit dipastikan apakah negeri-negeri semacam Skandinavia akan bergabung; namun yang pasti, integrasi kawasan Skandinavia sendiri telah semakin kokoh. Jika teori klasik mengenai tesis dan antitesis dalam perkembangan peradaban masih berlaku, maka kedua kawasan ini memiliki opsi integrasi langsung, atau sekadar berhadapan (*vis-à-vis*), atau konfrontasi. Bagaimanapun, integrasi tampaknya akan menjadi keniscayaan sejarah masa depan, dalam derajat apapun.

Lihat lah contoh-contoh lain dari unit-unit nasional. Kegagalan skema kontraksi negara Amerika Serikat pada kasus Puerto Rico, Kanada pada Quebec, dan kasus terakhir Inggris Raya pada Skotlandia,²⁴ serta tahun-tahun panjang upaya yang tak pernah berhasil dari bangsa Catalunya dan Irlandia Utara, semuanya menunjukkan bahwa kecenderungan non-

²⁴ Hasil referendum September 2014, hanya 45 persen penduduk Skotlandia yang menghendaki kemerdekaan dari Inggris Raya; selebihnya, 55 persen, memilih untuk tetap bergabung di dalam Inggris Raya. Fakta ini jauh dari hiruk pikuk politik sebelum referendum, bahwa mayoritas rakyat akan memilih opsi merdeka.

kontraksi negara – sekalipun mungkin tak sampai pada tahapan integrasi kawasan besar yang terdiri atas beberapa negara, atau integrasi kawasan kecil, yang terdiri dari sejumlah unit kebangsaan di bawah nation-states – bukan hanya sekadar fenomena atau gejala. Kasus-kasus tersebut adalah bukti keniscayaan yang diametral dengan kecenderungan integrasi. Bagi kalangan yang masih percaya pada basis material peradaban, garis batas dua kecenderungan tersebut adalah status ekonomi masyarakat-masyarakat yang terlibat.

Di bawah tesis ini, Balkanisasi bukan kecelakaan sejarah, melainkan kegagalan integrasi yang dipaksakan Uni Soviet atas unit-unit nation-states yang tingkat kesejahteraannya belum siap untuk secara alamiah mengalami proses integrasi seperti Schengen. Pertanyaan hipotetis dapat diajukan tentang apakah baik secara faktual-empirik maupun kebatinan bangsa Timor Timur juga mengalami transformasi yang belum selesai, sebagaimana kita dapat bercermin pada Ukraina dan eks kawasan *levantine* Uni Soviet lainnya di Balkan. Pertanyaan ini relevan, mengingat ada NKRI di dalamnya; sementara sejarah lepasnya Singapore dari Malaysia dan kembalinya ASEAN sebagai satu kawasan ekonomi – terlebih lagi, sebagai unit sosial yang longgar – menunjukkan proses sejarah yang relatif sejajar dengan Schengen dan kawasan lain.²⁵

Kesejahteraan – sebagai garis batas – yang melumer – jelas akan mempercepat integrasi. Semakin lebar disparitas antar unit ekonomi yang bertetangga, semakin berat dan lambat kecenderungan integrasi akan terjadi. Namun, fakta ini sekaligus meneguhkan tesis, bahwa semakin maju dan makmur masyarakat-masyarakat di satu kawasan, akan semakin cepat integrasi terjadi. Inilah tampaknya yang merupakan *rationale* pembentukan kawasan sosial-ekonomi ASEAN pada 2015.²⁶ Namun, disparitas ekonomi Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya – khususnya dengan Singapore dan Malaysia, serta pada derajat yang semakin tinggi Thailand dan Vietnam – menimbulkan kekhawatiran mengenai volatilitas isu ini terhadap NKRI. Belum lagi jika diperhitungkan, bahwa antar wilayah dan provinsi di dalam intra Indonesia sendiri masih didapati disparitas kesejahteraan yang lebar.

²⁵ Tentang visi awal dan strategi survival Singapore, serta implikasinya pada penekanan stabilitas dan langkah-langkah ketertiban umum, dalam Chan Heng Chee & Obaid Ul Haq, eds, *S. Rajaratnam, the Prophetic and the Political*, (Singapore: ISEAS, 2007). Visi dan strategi yang diwarisi dan dimapankan nyaris sempurna oleh Lee Kuan Yew. Lihat, antara lain, Lee Kuan Yew. Bdk untuk Mahathir, Tom Plate, *Doctor M: Operation Malaysia: conversation with Mahathir Mohammad*, Singapore, Marshall Cavendish.

²⁶ Rodolfo C. Severino, *Southeast Asia in Search of an ASEAN COMMUNITY: Insights from the former ASEAN Secretary-General*, (Singapore: ISEAS, 2006).

Tesis tentang penghindaran kontraksi dan fragmentasi *nation-states* serta penghampiran integrasi kawasan berbasis, antara lain, material, yang ditampilkan dari derajat kesejahteraan masyarakat unsur-unsur pendukungnya, dapat dijadikan referensi dalam menatap masa depan Indonesia, dalam jarak yang dekat maupun jauh. Mobilitas orang, barang dan jasa antar negara ASEAN akan memungkinkan masyarakat Indonesia untuk menyaksikan dan bertransaksi langsung dengan warga negara-negara tetangga. Mereka yang *inward looking* akan menatap penuh cemas imaji baru ini; sebaliknya, kaum optimis sangat eager menyongsong peluang ke depan, tanpa jebakan prasyarat “demi stabilitas nasional dan ketertiban umum,” karena telah terbukti dua kali gagal dalam mengantarkan masyarakat Indonesia melampaui “jembatan emas”nya Bung Karno.

Pencarian definisi dan rumusan serta tafsir baru mengenai nasionalisme dan batas-batasnya. Proses integrasi kawasan telah menjadi keniscayaan, sehingga Indonesia harus menyongsong masa depan dengan lingkungan strategis seperti ini. Nasionalisme sempit (*chauvinisme*) bukanlah jawaban yang memadai; sebaliknya, *outward looking* yang berlebihan juga bukan merupakan respons situasi yang diperlukan Indonesia.

Reformasi Jepang di bawah skema Restorasi Meiji telah memberikan contoh mengenai tafsir ulang atas makna nasionalisme, yang berujung pada ketahanan nasional yang luar biasa, bahkan pernah eksekusi sewaktu PD II. Namun, Jepang sekali lagi menunjukkan contoh yang luar biasa mengenai ketahanan nasional ini pada demoralisasi dan runtuhnya *dignity* bangsa pada pasca PD II. Seharusnya kita belajar dari pengalaman mahal yang pernah ditapaki Jepang, agar bangsa Indonesia tidak perlu membayar ongkos sejarah yang terlalu mahal. Pelajaran itu antara lain adalah penguatan stabilitas dan ketertiban sosial; untuk konteks Indonesia, sebagaimana narasi di bawah.

Barangkali Indonesia perlu mempelajari manajemen *consensual conflicts* ala Singapore dan Malaysia. Prasyarat stabilitas dan tertib sosial di kedua tetangga itu menghasilkan kue ekonomi yang cukup untuk dibagi, sehingga bagi Singapore stabilitas relatif dibangun di atas konstruksi konsensus-konsensus politik yang lebih luas ketimbang proses serupa di Malaysia. *Look to the East* nya Mahatir untuk sementara memang dapat menjadi contoh kapasitas mengunyah (*eschewing*), yang bagi Malaysia adalah unsur-unsur peradaban Timur Jauh, khususnya Jepang dan China. Namun, sejarah masih harus menunggu, apakah kombinasi antara kapasitas kultural ini dengan represi politik yang eksekusi di Malaysia akan

viale untuk jangka panjang. Upaya reproduksi “Reformasi” Indonesia oleh kalangan oposisi Malaysia belum membuahkan hasil; sementara kaki-kaki integrasi nasional berupa keseimbangan ras dan etnik menunjukkan indikasi yang rapuh. Pertanyaan hipotetis: jikalau kue ekonomi tidak cukup besar lagi untuk dapat dibagi secara merata, apakah Malaysia akan mengalami kontraksi? Suatu pertanyaan hipotetis yang rasional, mengingat pengalaman Indonesia dengan bangunan kertas Orde Baru yang berujung pada Reformasi 1998.

Penutup

Pada akhirnya, kondisi objektif dari lingkungan strategis nasional sebagai suatu keniscayaan tidak akan dapat kita hadapi dan sikapi dengan *dignity* sebagai suatu negara-bangsa yang besar, manakala prasyarat objektif dari kondisi internal-domestik, tidak terpenuhi. Setidaknya ada dua replika prasyarat dari sapan-sapan peradaban di atas kanvas besar sejarah dunia, yakni stabilitas dan ketertiban sosial. Telah disinggung, bahwa kanvas sejarah Indonesia menyaksikan metamorfosa *rust en orde* dari masa *indirect rule*, *high colonialism*, dan negeri *beamtenstaat*, hingga stabilitas masa Orde Baru – yang terbukti kemudian hanya sukses sebagai bangunan kertas.²⁷ Namun, semua sistem ini dibangun di atas koherensi berbasis koersif.

Usai Reformasi 1998, kita memasuki era baru, dengan melandaskan koherensi kebangsaan pada konsensus demi konsensus hasil perhadapan *public discourses* yang menjadikan antar kita sebagai *self-otherness* satu dengan yang lain.

Hingga saat ini (1998-2014), *viability* sistem terbukti mampu menghadapi volatilitas lingkungan strategis, yang tidak selalu bersahabat. Kita perlu, dan harus, optimis dalam menghadapi masa depan Indonesia, karena ujian demi ujian atas pilihan sistem terakhir kita telah terbukti sukses. Terlepas dari kelemahan di sana-sini, pemilihan presiden (pilpres) membuktikan, bahwa stabilitas dan ketertiban sosial yang dibangun atas proses-proses *consensual conflicts* – yang menjadi fondasi dari prinsip-prinsip demokrasi – akan menghasilkan sistem yang jauh lebih *sustainable*

²⁷ Cukup banyak kepustakaan mengenai pergolakan Reformasi, sebagai puncak bangunan kertas stabilitas nasional Orde Baru. Lihat, misalnya, James Luhulima, ed, *Hari-hari Terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto dan beberapa peristiwa terkait*, (Jakarta: Kompas, 2007). Untuk perspektif dari bawah, baca buku saya, *Lawan! Jejak-jejak Jalanan di Balik Kejatuhan Soeharto*. (Jakarta : Pensil-324, 2000).

dan *viable*, ketimbang bangunan kertas kedua dimensi ini pada masa lampau yang dekat.

Esai itu adalah narasi besar dan menengah nasional, sementara narasi kecil ditorehkan pada kanvas sosial-ekonomi dan politik lokal. Jika narasi besar di atas kanvas peradaban dunia telah membuktikan kemenangan korelasi positif yang kuat antara stabilitas dan ketertiban dalam bentuk bangunan masyarakat demokratis dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan integrasi kawasan, maka narasi kecil di atas kanvas peradaban lokal masih menayangkan pergulatan yang belum selesai.

Arah transisi demokrasi Indonesia Baru di bawah Orde Reformasi bukan disikapi sebagai kontestasi dunia nasional dengan dunia besar yang menjadi lingkungan strategisnya, melainkan justru disikapi dengan pertarungan antara wacana-wacana lokal *vis-à-vis* nasional.²⁸ Itulah sebabnya, penguatan *local geniuses* dan kebajikan lokal yang seharusnya dilakukan guna memperkuat ketahanan nasional justru disikapi dengan penafikan atas unsur-unsur nasional. Pada aras praksis politik, dekonsentrasi dimaknai sebagai desentralisasi.

Sebagaimana premis dasar berlangsungnya reformasi—apalagi revolusi—bahwa tercipta situasi anomie—nilai-nilai lama telah hilang, sementara nilai-nilai baru belum terbentuk, maka negara hampir-hampir absen dari ranah publik. Di daerah-daerah dimana kohesi sosial lemah karena unsur koersif yang menopangnya runtuh, timbul konflik-konflik horizontal maupun vertikal. Fenomena yang mirip—sehingga sering ditafsirkan dan disikapi secara salah pula—dengan proses Balkanisasi. Lanskap persoalan dalam ranah tertib sosial memaparkan mozaik potensi ancaman, problem kongkret, sekaligus harapan-harapan dalam menghadapi situasi baru. Lanskap itu adalah isu *Pluralism*, yang tidak akan pernah selesai bagi bangsa Indonesia; pluralisme adalah *assets* sekaligus *liability* bagi bangsa ini.²⁹ Suatu lanskap yang berfungsi sebagai kanvas besar dari corat-coret narasi besar sejarah ini; dengan ancaman besar yang berulang adalah sejarah konflik-konflik dan kekerasan.³⁰ Pada

²⁸ Sebagian scholars percaya, Indonesia sukses menjalani transisi menuju *consolidated democracy* di bawah skema Alfred Stepan dan Juan Linz. Narasi agak lengkap tentang transisi dapat dibaca dalam, antara lain, Taufik Abdullah, *Indonesia Towards Democracy*, (Singapore: ISEAS, 2009).

²⁹ Sebagian kontur lanskap ini dalam Robert W. Hefner, ed., *The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*, (Honolulu: University of Hawaii Press, 2001).

³⁰ Eva-Lotta E. Hedman, ed., *Conflict, Violence, and Displacement in Indonesia*, (Ithaca: SEAP, 2008).

peta kontemporer, coretan di atas kanvas lebih mengerikan: Terorisme.³¹ Sebagaimana halnya dengan lanskap sosial dan ekonomi yang terhampar dengan integrasi Masyarakat ASEAN, terorisme di Indonesia juga tidak terlepas dari peta potensi terorisme Asia Tenggara.³² Untuk kondisi yang lebih eksklusif domestik, ancaman itu berupa potensi konflik etnik.³³ Namun, tanpa harus meyakini bahwa "*l'histoire se repete,*" tampaknya masyarakat bisa mempercayai kapasitas *beamtenstaat* birokrasi,³⁴ sebagaimana pernah kita alami berkali-kali situasi anomie: negara tetap bisa hadir sebagai perawat dan pemelihara stabilitas dan ketertiban umum.

³¹ Reza Aslan, *How to Win a Cosmic War: God, Globalization, and the End of the War on Terror*, (New York: Random House, 2009).

³² Andrew T.H. Tan, ed., *A Handbook of Terrorism and Insurgency in Southeast Asia*, (Cheltenham: Edward Elgar, 2007).

³³ Kusuma Snitwongse dan W. Scott Thompson, ed., *Ethnic Conflicts in Southeast Asia*, (Singapore: ISEAS, 2005).

³⁴ B. Guy Peters, *The Politics of Bureaucracy*, (London : Routledge, 2001).